

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan pemrosesan informasi yang semakin kompleks dan bisnis proses yang selalu berkembang menyebabkan meningkatnya penggunaan teknologi informasi (TI) secara masif. Pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia saat ini sangat luas pemanfaatannya mulai dari bidang UMKM [1], *Smart City* [2] hingga bisnis [3]. Untuk menjamin segala kebijakan diterapkan dan berjalan dengan baik sebuah evaluasi atau audit perlu dilakukan terhadap tata kelola TI yang ada agar seluruh mekanisme manajemen TI sesuai dengan perencanaan, serta tujuan dan proses bisnis instansi. Alfajri (2021) menyatakan bahwa evaluasi tata kelola TI sangat dibutuhkan untuk menjaga kestabilan proses bisnis baik instansi maupun perusahaan [4].

Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejaksaan RI) adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang [5]. Kejaksaan RI merupakan badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan RI dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan RI terdiri atas Kejaksaan Agung yang berada di tingkat nasional, Kejaksaan Tinggi di tingkat provinsi, Kejaksaan Negeri serta Cabang Kejaksaan Negeri di tingkat kabupaten/kota merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan [6].

Dalam 7 Perintah Jaksa Agung tahun 2021 telah diamanatkan pengembangan

arah baru yaitu Kejaksaan Digital [7]. Kejaksaan Digital merupakan strategi dalam reformasi *core business* dari Kejaksaan RI untuk menggunakan Teknologi Informasi (TI) dalam kegiatan proses bisnisnya Digitalisasi yang dilakukan meliputi setiap aspek dan bidang pada Kejaksaan untuk dapat mengukur kinerja secara *real time*, serta sebagai bentuk akuntabilitas publik. Disadari pula bahwa transformasi digital teknologi bukan hanya percepatan, kemudahan, dan akurasi, tetapi bagaimana informasi itu diakses oleh publik dengan mudah, transparan, objektif, dan tidak berbelit-belit [8]. Wujud dari Kejaksaan Digital tercermin dari dikeluarkannya beberapa aplikasi atau sistem informasi berbasis TI yang diselenggarakan oleh Kejaksaan RI antara lain Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (SIMKARI), E-Kepegawaian (E-DOSIR), *Case Management System* (CMS), Sistem Informasi Persuratan Disposisi Elektronik (SIPEDE), dan aplikasi terintegrasi *Kejaksaan Mobile* [9].

Salah satu aplikasi menjadi tulang punggung dalam tugas dan fungsi utama Kejaksaan dalam penanganan perkara adalah CMS. CMS merupakan kependekan dari *Case Management System*, suatu aplikasi yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia melalui Pusat Data Statistik dan Kriminal (Pusdaskrimti) Kejaksaan RI yang dapat membantu dalam hal penanganan perkara pidana umum maupun pidana khusus dalam rangka mendukung Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Pengelolaan sistem CMS diserahkan kepada satuan kerja masing-masing di daerah, akan tetapi masih ada laporan dari pengguna aplikasi CMS mengenai kurang optimalnya sistem yang sedang berjalan. CMS merupakan aplikasi yang digunakan dan telah berjalan cukup lama

dibandingkan aplikasi lain seperti SIPEDE dan Kejaksaan Mobile, dan telah menjadi bagian dari proses bisnis yang tidak dapat dipisahkan dan sulit untuk kembali menjadi manual kembali sehingga perlu dilakukan audit seberapa besar CMS berdampak pada pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan oleh instansi Kejaksaan RI.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pihak pada Kejaksaan Negeri Indramayu baik dari jabatan struktural maupun staf yang menggunakan CMS, evaluasi secara khusus terhadap CMS belum pernah dilakukan. Sejauh ini evaluasi lebih ditekankan pada pemeriksaan atau audit berkala terhadap ketertiban administrasi, penanganan perkara, kesesuaian sarana prasarana, keuangan dan penerimaan negara dalam bentuk program Inspeksi Umum, Inspeksi Pemantauan, dan Inspeksi Khusus dari bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Agung. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi internal atau audit yang dapat dilaksanakan secara mandiri untuk menilai sejauh mana sistem eksisting sudah menerapkan tata kelola TI sesuai dengan standar tertentu dan sejauh mana sistem mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Evaluasi sistem juga dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja sistem lebih baik lagi. Rekomendasi perbaikan dapat dipertimbangkan oleh pimpinan sehingga dapat memberi masukan kepada tim pengembang Pusdaskrimti Kejaksaan RI untuk meningkatkan aplikasi yang sudah ada. Untuk meningkatkan manfaat dan meminimalkan resiko atas investasi TI, sehingga secara berkelanjutan dapat tercapai *Good Governance*.

Dalam melakukan proses tata kelola TI seperti audit TI, terdapat beberapa pilihan kerangka kerja / *framework* TI yang mempunyai tujuan mengukur sejauh

mana layanan TI telah bekerja yang sesuai dengan tujuan strategis TI dan bisnis, mengoptimalkan kualitas layanan, dan juga melakukan efisiensi biaya. Pilihan framework cukup banyak seperti COBIT, ITIL, CMMI, PMBOK, maupun standar seperti ISO/EIC. Pada penelitian ini framework yang akan digunakan adalah COBIT versi 5. Alasan pemilihan framework ini adalah COBIT 5 sendiri merupakan gabungan dari best practice dari beberapa framework pada tata kelola sistem informasi seperti COBIT 4, ITIL, CMMI, Val IT, dan sebagainya. COBIT 5 sendiri telah terdapat domain-domain yang telah memiliki fungsi dalam proses audit tata kelola, dan telah menyediakan layanan untuk melaksanakan audit dengan hasil akhir berupa nilai kemampuan (*Capability Level*) sehingga dapat ditentukan kondisi global secara umum menggunakan skoring secara kuantitatif. Selain itu COBIT 5 dapat menghasilkan rekomendasi dan saran yang diperlukan untuk meningkatkan *Capability Level* ke level selanjutnya bila diperlukan.

COBIT pada instansi pemerintah telah diteliti dalam beberapa tempat seperti perguruan tinggi [10][11], kantor pemerintah [12][13][14][15], dan rumah sakit [16]. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadikan Kejaksaan RI sebagai subjek instansi evaluasi COBIT. Fahreni, Negara, & Kunang (2020) melakukan penelitian dengan judul “Tata Kelola terhadap Layanan IT di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Perspektif Internal pada COBIT 5”. Domain yang digunakan adalah APO07, EDM04, BAI04, dan MEA01 menggunakan metode kuesioner tanpa evaluasi suatu aplikasi. Hasilnya adalah Tingkat kematangan tata kelola atau *Maturity Model* dengan APO07 senilai 3,59, BAI04 dengan nilai 3,66, EDM 04 dengan nilai 3,3 dan

MEA01 dengan nilai 4 [17]. Rabhani, et al. (2020) melakukan penelitian dengan judul “Audit Sistem Informasi Kepegawaian pada Kejaksaan Negeri Bandung dengan domain MEA pada COBIT 5”. Aplikasi yang dievaluasi adalah Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Domain yang digunakan adalah domain MEA (*Monitor, Evaluate, dan Asses*) yang terdiri atas MEA01 (*Monitor and Evaluate Performance and Conformance*), MEA02 (*Monitor System of Internal Control*), dan MEA03 (*Monitor and Evaluate Compliance with External Requirements*). Hasil dari penelitian ini adalah Capability Level yang didapat dari rata-rata subdomain MEA tersebut adalah 2.4. Score tersebut berada pada rentang 1,5-2,5 yang terletak pada Level *Capability* kategori kedua yaitu *Managed Process* [18].

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang diatas, penulis akan menfokuskan pada sebuah judul penelitian Mengenai “Audit Tata Kelola *Case Management System* (CMS) pada Kejaksaan Negeri Indramayu menggunakan Framework COBIT 5”, sehingga nantinya dengan adanya evaluasi pada tata Kelola CMS menggunakan COBIT 5 diharapkan dapat memperbaiki sistem tata Kelola TI yang sedang maupun akan dijalankan Kejaksaan Negeri Indramayu sehingga dapat mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan dari Kejaksaan Negeri Indramayu

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Belum adanya evaluasi internal atau audit yang dapat dilaksanakan untuk

mengevaluasi tata kelola TI berdasarkan standar kerangka kerja tertentu dan sejauh mana sistem mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi;

2. Belum ada pengukuran yang dapat diukur dalam Tata Kelola TI tersebut; dan
3. Perbaikan atau langkah yang dapat diambil dalam meningkatkan Tata Kelola TI tersebut.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini guna mendukung pencapaian tujuan organisasi sebagai berikut:

1. Bagaimana menentukan domain proses masukan terhadap Tata Kelola *Case Management System* (CMS) pada Kejaksaan Negeri Indramayu berdasarkan kerangka kerja COBIT 5;
2. Bagaimana tingkat kemampuan (*Capability Level*) terhadap Tata Kelola *Case Management System* (CMS) pada Kejaksaan Negeri Indramayu; dan
3. Apa saja usulan dan rekomendasi terhadap aplikasi *Case Management System* (CMS) pada Kejaksaan Negeri Indramayu berdasarkan kerangka kerja COBIT 5.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menentukan kebutuhan domain proses yang menjadi masukan pada Tata

Kelola *Case Management System* (CMS) Kejaksaan Negeri Indramayu berdasarkan kerangka kerja COBIT 5

2. Menentukan Tingkat kemampuan (*Capability Level*) pada *Case Management System* (CMS) Kejaksaan Negeri Indramayu berdasarkan kerangka kerja COBIT 5
3. Memberikan usul dan rekomendasi pada *Case Management System* (CMS) yang dijalankan oleh Kejaksaan Negeri Indramayu.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi tata Kelola TI di bidang *Case Management System* dan atau sistem informasi penegakan hukum sejenis

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai analisis dan evaluasi *Case Management System* berdasarkan COBIT 5 dalam rangka meningkatkan kinerja *Case Management System* secara umum dan mendukung proses bisnis penegakan hukum secara khusus.

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya analisis dan evaluasi tatakelola TI yang mengarah kepada tata kelola yang baik (*good governance*), mengoptimalkan manfaat (*value*) dan meminimalkan risiko (*risk*) atas implementasi TI pada Kejaksaan Negeri Indramayu.

1.6. Pembatasan Masalah dan Asumsi

Agar penelitian ini dapat lebih terarah, maka penulis menetapkan beberapa Batasan masalah sebagai berikut:

1. Evaluasi atau audit dilakukan pada *Case Management System (CMS)* versi terbaru, yaitu 1.8.1;
2. Lingkup tatakelola TI yaitu layanan manajemen kasus pidana umum mulai dari penerimaan SPDP, proses tahap 1 pra penuntutan, tahap 2 penuntutan, tahap 3 eksekusi, dan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Indramayu;
3. Pengukuran nilai kemampuan COBIT 5 yaitu *Capability Level*;

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang dilakukannya penelitian, penjelasan mengenai permasalahan pokok yang dihadapi, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat dilakukannya penelitian, pembatasan masalah penelitian,

dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan mengenai konsep dasar teoritis yang tentunya mendukung penelitian. Serta uraian tentang dasar-dasar keilmuan yang mendukung pembahasan pada laporan penelitian tesis ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai profil dari instansi, visi dan misi, struktur organisasi, tugas pokok dan tugas pelaku organisasi dan metodologi yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian berupa tingkat kapabilitas saat ini dan diharapkan pada *Case Management System* (CMS) pada Kejaksaan Negeri Indramayu, rekomendasi perbaikan dan saran untuk mencapai tingkat kapabilitas yang diharapkan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian. Kesimpulan yang menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian, serta saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam pengembangan penelitian ini selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar dari seluruh kepustakaan yang digunakan. Penulisan daftar Pustaka mengikuti kaidah-kaidah tata naskah yang berlaku.

LAMPIRAN

Pelengkap informasi mengenai instrumen penelitian, seperti dokumen pendukung dan bukti hasil observasi bila diperlukan.